

# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Kondisi SDM dan Struktur Organisasi PPN Brondong .....	3
1.4 Peran Strategis PPN Brondong.....	4
1.5 Sistematika Laporan.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
3.3 Realisasi Anggaran.....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
<b>Lampiran</b>	



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikatif kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lamongan, 10 Januari 2023

Kepala Pelabuhan



Ibrahim A.Pi, M.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

PPN Brondong pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 13.847.901.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 13.731.967.724 atau (99,16%). Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,14%, hal ini didukung oleh tercapainya 19 capaian indikator kinerja.



Gambar 1. Tampilan Dasborad Kinerjaku PPN Brondong Tahun 2022

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan



- 2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2022 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2022 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

## **1.2. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;

10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### 1.3. Kondisi SDM dan Struktur Organisasi PPN Brondong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPN Brondong di dukung oleh 68 orang pegawai yang terdiri atas PNS 50 orang (73%), CPNS 2 orang (3%), PPPK 2 orang (3%) dan PPNP 14 orang (115). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada tahun 2022 berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.

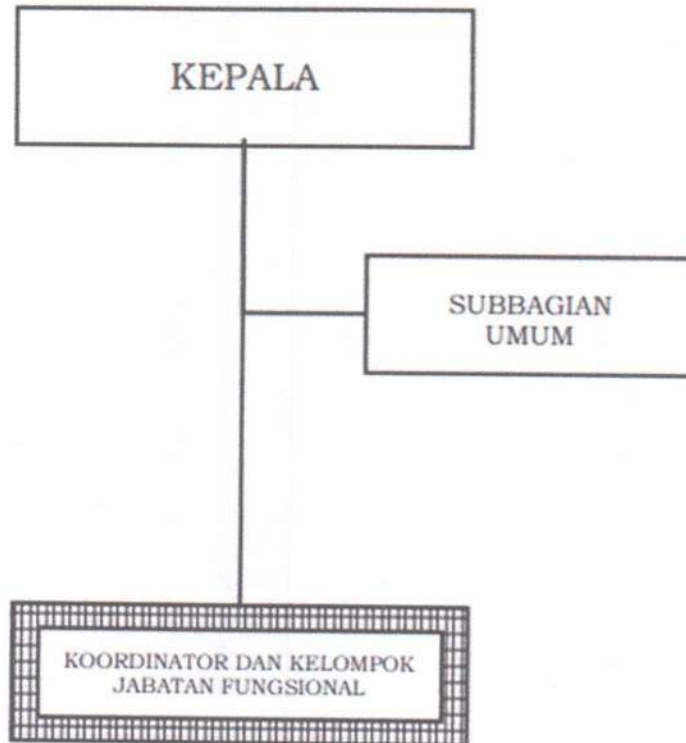
Tabel 1.  
Komposisi Pegawai Di PPN Brondong Pada Tahun 2022  
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
PNS	-	-	10	1	25	13	1	-	36	14	50
CPNS	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
PPPK	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
PPNP	-	-	12	-	2	-	-	-	14	-	14
Jumlah	-	-	23	2	25	13	1	-	49	15	68

Susunan organisasi PPN Brondong terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Subbagian Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA



Gambar 2. Stuktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara

### 1.4. Peran Strategis PPN Brondong

Tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap,
2. Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

PPN Brondong sebagai garda terdepan tentunya mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan perikanan tangkap melalui dukungan SDM yang berkompeten, anggaran dan dilengkapi sarana prasarana. Dalam melaksanakan perannya, PPN Brondong akan menghadapi tantangan yaitu kondisi kegiatan panangkapan ikan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah



lingkungan, dominasi kapal perikanan tradisional dan rendahnya kualitas SDM masyarakat perikanan.

### 1.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja PPN Brondong selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) PPN Brondong Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2022.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan (PK).
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Lampiran**, berisi Perjanjian Kinerja dan data lainnya.

## BAB II RENCANA KINERJA

### 2.1. Rencana Startegis

Visi PPN Brondong yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam mewujudkan visi diatas, maka PPN Brondong mempunyai 4 (empat) misi yaitu:

- Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan
- Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas ikan hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu, mewujudkan konektifitas/jejaring antar pelabuhan perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan ikan, dan fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan insfratraktur/fasilitasi pelabuhan perikanan untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini.
- Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui reformasi birokrasi PPN Brondong

Dalam mewujudkan tercapainya misi dari PPN Brondong pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Sasaran Program dan 19 Indikator Kinerja sebagaimana pada Tabel 2.

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi



kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, serta Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.  
Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja  
PPN Brondong Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)	1,2
2	Ketersediaan Data Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Akurat	2 Rata-rata Volume Produksi Perikanan Tangkap Triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	4.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3 Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan (Produk)	65
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4 Nelayan / Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan /Kompetensinya (Orang)	30
		5 Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha (Orang)	30
5	Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBPN Perikanan Tangkap yang Optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6 Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk Menunjang PNBPN Perikanan Tangkap (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	82
7	Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya (Orang)	24
8	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9 Persentase kapal perikanan yang berizin di pelabuhan perikanan Nusantara Brondong (persen)	75
		10 Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Dikumpulkan dan Diversifikasi (Laporan)	160
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	11 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah Dinilai WBK) (Nilai)	75,07
		12 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (Persen)	100
		13 Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	80,01
		14 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	79
		15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan	75



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	
17		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
18		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	89
19		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	81

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjina Kinerja Tahun 2022, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.  
Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	228.600.000
	Pengelolaan pelabuhan perikanan	2.034.508.000
	Pengelolaan perizinan dan kenelayanan	4.000.000
	Pengelolaan sumber daya ikan	102.390.000
Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.478.403.000
<b>Total</b>		<b>13.847.901.000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2022. Capaian kinerja PPN Brondong dari 19 Indikator Kinerja secara keseluruhan tercapai dengan nilai 113,14, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  
Capaian Kinerja PPN Brondong Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
<b>S.01</b>	<b>Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				120,00
IKS.01.1	Penerimaan PNB di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)	Milyar	1,2	2,57	120,00
<b>S.02</b>	<b>Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang akurat</b>				117,14
IKS.02.1	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	Ton	4.000,00	4.685,42	117,14
<b>S.03</b>	<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				120,00
IKS.03.1	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Dokumen	65	478	120,00
<b>S.04</b>	<b>Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				110,00
IKS.04.1	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)	Orang	30	96	120,00
IKS.04.2	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	Orang	30	30	100,00
<b>S.05</b>	<b>Pemenuhan prasarana pemungutan PNB perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				100,00
IKS.05.1	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNB	Unit	1	1	100,00
<b>S.06</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing</b>				112,39
IKS.06.1	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	82	92,16	112,39
<b>S.07</b>	<b>Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				120,00
IKS.07.1	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Orang	24	40	120,00
<b>S.08</b>	<b>Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				108,25
IKS.08.1	Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional (Lembaga)	Lembaga	1	1	100,00
IKS.08.2	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	Laporan	160	182	113,75
<b>S.09</b>	<b>Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong</b>				110,52
IKS.09.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	Nilai	75,07	89,19	118,81
IKS.09.2	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	Persen	100	100	100,00
IKS.09.3	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	80,01	80,4	100,49



IKS.09.4	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Indeks	79	81,91	103,68
IKS.09.5	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	75	100	120,00
IKS.09.6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	75	98,68	120,00
IKS.09.7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	75	85	113,33
IKS.09.8	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	89	95,85	107,70
IKS.09.9	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	81	89,64	110,67

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Tahun 2022:

### **S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

#### **IKS 01.1. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis perimanaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

Jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1;
2. Bangunan Permanen;
3. Pemeliharaan Prasarana;
4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap;

5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang;
6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin (Volume >500 kg);
7. Penggunaan ABF (Frezeer);
8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan
9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.

Jenis PNBPN yang berasal dari jasa pelabuhan perikanan yaitu:

1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT);
2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT);
3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan;
4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI;
5. Pelayanan bengkel;
6. Pelayanan jasa pas masuk harian;
7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan
8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup.

Pengukuran capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” dengan membandingkan realiasi dengan target yang telah ditetapkan, bila nilai realisasi lebih besar atau sama dengan pada target maka kinerja tercapai dan sebaliknya bisa nilai realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Realiasi PNBPN PPN Brondong pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.576.677.784,-.

Tabel 5.  
Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN  
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)	1,2	2,57	142,77

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi PNBPN PPN Brondong tahun 2022 lebih besar dari target yang telah ditetapkan sehingga kinerja IK “Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tercapai dengan tingkat capaian kinerja 214,72%. Dibandingkan dengan realisasi PNBPN periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nilai PNBPN di UPT Pelabuhan Perikanan



Nusantara Brondong” mengalami kenaikan sebesar Rp. 771.020.088 tetapi dalam capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 19,78%. Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, target PNBPN pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan sebesar Rp. 1,6 Milyar sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampaui dari target.

Pencapaian IK “Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Optimalisasi pelayanan penggunaan ruang pendingin (volume >500 kg) dan ABF (*frezeer*) pada 2 unit *cold storage* milik PPN Brondong.
2. Melakukan pembinaan pengusaha kepada pelaku usaha.
3. Sosialisasi dan pelayanan pas masuk berlangganan kepada masyarakat.
4. Peningkatan konsolidasi data antar subkoordinator lingkup PPN Brondong.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi PNBPN di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Percepatan proses perijinan dokumen kapal perikanan sehingga pelayanan tambat labuh kapal perikanan dapat dilakukan penarikan PNBPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan identifikasi potensi sumber-sumber penerimaan PNBPN di PPN Brondong.
3. Optimalisasi pengelolaan PNBPN berbasis aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA).

## **S.02 Ketersediaan Data Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Akurat**

### **IKS 02. 1. Rata-rata Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Volume produksi perikanan tangkap pada PPN Brondong merupakan hasil penangkapan ikan yang berasal dari laut oleh kapal penangkap ikan dan didaratkan di PPN Brondong. Tahapan dalam memperoleh volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong dimulai dari kegiatan pengumpulan data produksi oleh enumerator setiap hari dengan melakukan

pencatan secara langsung hasil tangkapan setiap kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Brondong. Selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh petugas pengelola data dengan merekapitulasi data enumerator sehingga diperoleh data volume produksi perikanan tangkap yang telah divalidasi internal. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, rata-rata volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong sebesar 4.685,42 ton/bulan.

Tabel 6.  
Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Rata-rata Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	4.000	4.685,42	117,14

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rata-rata volume produksi ikan pada tahun 2022 adalah sebanyak 4.685,42 ton atau lebih besar dari target sebesar 685,42 ton sehingga persentase capain kinerja sebesar 117,14%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Rata-rata Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami kenaikan sebesar 111,97 ton dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,50% . Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, target produksi perikanan tangkap pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan sebesar 51.860 ton dengan rata-rata volume produksi perikanan tangkap sebesar 4.321,67 ton sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampaui dari target.

Pencapaian IK “Rata-rata Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Meningkatnya jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Brondong.
  2. Terjadwalkannya piket petugas enumerator setiap hari untuk mendata jumlah produksi ikan yang didartkan di PPN Brondong.
  3. Jumlah petugas enumerator dan pengelola data yang mencukupi
- Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi produksi perikanan tangkap



di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan kompetensi enumerator dan petugas pengelola data.
2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana petugas enumerator
3. Penggunaan data e-PIT dalam perhitungan produksi perikanan tangkap.

### **S.03 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

#### **IKS 03. 1. Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan**

Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/ VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Tahun 2022 telah menerbitkan sebanyak 478 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.

## Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan	65	478	735,38

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian penerbitan dokumen kapal berupa SKKP sebanyak 478 dari target sebanyak 65 atau presentase kinerja mencapai 735,38%. Realisasi IK “Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan” pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena pada tahun 2021 IK “Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan” tidak ada. Pencapaian IK “Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan” tahun 2022 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang;
2. Penyampaian permohonan penerbitan pembaharuan SKKP dapat dilakukan melalui Online; dan
3. Sinergitas dengan Pemerintah daerah dalam kegiatan Gerai pelayanan terpadu di lokasi sentra Nelayan atau Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan khususnya SKKP di PPN Brondong pada tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan PPN Brondong;
2. Penambahan peralatan kerja, alat pengolah data dan perlengkapan personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
3. Perlu dilakukan Gerai pelayanan Dokumen Kapal Perikanan terpadu dengan instansi terkait secara berkala dan terjadwal pada sentra Nelayan dan/atau Pelabuhan Perikanan UPTD yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.



#### S.04 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

##### IKS 04. 1. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya

Kompetensi Awak Kapal Perikanan yang ditingkatkan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawakan Kapal Perikanan dengan focus melakukan Bimtek Kecakapan Nelayan dengan sasaran para Nelayan dengan Kapal ukuran sampai dengan 5 GT dengan diterbitkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN).

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimtek TOT untuk Instruktur dan sertifikasi Lembaga Bimtek SKN dalam upaya untuk melaksanakan Bimtek dan menerbitkan SKN bagi Nelayan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT. PPN Brondong sebagai salah Lembaga Bimtek SKN yang telah ditetapkan oleh direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 telah menerbitkan sebanyak 96 dokumen SKN sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.

Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan  
pengetahuan /kompetensinya Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	30	96	320

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian penerbitan dokumen kapal berupa SKN sebanyak 96 dari target sebanyak 30 atau presentase kinerja mencapai 320%. Realisasi IK “Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya” pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021, karena pada tahun 2021 IK “Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya” khususnya untuk penerbitan SKN tidak ada. Pencapaian IK “Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya” tahun 2022 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Instruktur SKN sampai tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang;
2. Sinergitas dengan Pemerintah daerah dalam kegiatan Gerai pelayanan terpadu di lokasi Kampung Nelayan Maju (KALAJU) yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Penerbitan SKN di PPN Brondong pada tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Instruktur SKN PPN Brondong;
2. Pengadaan peralatan parktek, alat pengolah data dan perlengkapan personel Instruktur Bimtek SKN Lembaga Diklat PPN Brondong;

**IKS 04. 2. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha**

Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan PKL tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja adalah PP 27/2021 dan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Bab Kesebelas terkait PKL. Pelaksanaan penerapan PKL dilaksanakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, pelaksanaan PKL di PPN Brondong pada Tahun 2022 telah melaksanakan desiminasi fasilitasi PKL kepada 30 orang nelayan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.

Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	30	30	100



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian fasilitasi PKL sebanyak 30 orang dari target sebanyak 30 orang atau presentase kinerja mencapai 100%. Realisasi IK “Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha” pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 memiliki capaian atau realisasi dari target yang sama yaitu 100%. Pencapaian IK “Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha” tahun 2022 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pelaksanaan fasilitasi PKL Awak Kapal Perikanan dilaksanakan dalam bentuk desiminasi dan mengundang awak kapal perikanan dan perwakilan pengusaha perikanan tangkap;
2. Sinergitas dengan BPJS maupun Pemerintah daerah dalam kegiatan fasilitasi PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pelayanan atau fasilitasi PKL Awak Kapal Perikanan di PPN Brondong pada tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi petugas kesyahbandaran terutama pelayanan PKL dengan menggunakan aplikasi e PKL;
2. Pengadaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi PKL bagi Awak Kapal Perikanan di PPN Brondong;

#### **S.05 Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal**

##### **di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

#### **IKS 05. 1. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBP**

Untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong maka sangat dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pendapatan tersebut, utamanya adalah sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan jasa.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdapat banyak pelayanan jasa

yang bisa menghasilkan PNBP, dan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan PNBP yang berasal dari jasa Pelabuhan Perikanan.

Pada tahun anggaran 2022 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sesuai dengan DIPA nomor : DIPA -032.03.2.427692/2022, Tanggal 17 November 2021 mendapatkan kegiatan untuk meningkatkan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan termasuk untuk meningkatkan PNBP Perikanan Tangkap (PEN).

Tabel 10.

Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBP	1	1	100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBP ada 1 unit yaitu Pembuatan Pagar BRC yang ditempatkan disekitar dermaga pembongkaran dimana hal ini diharapkan agar pembongkaran ikan dari kapal perikanan dapat dimonitor jumlah produksinya serta bagi orang yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk diarea dermaga pembongkaran ikan.

Pelaksanaan pembangunan pagar BRC tersebut pada bulan Juni 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Berkah Pradipta dan Kontrak nomor : 318/SPK/PPNBR.PPK-22/PL.430/VI/2022 dengan nilai sebesar Rp. 142.241.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan juga pembuatan pagar BRC yang kedua dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Agung Jaya Bersaudara dan Kontrak nomor : 315/SPK/PPNBR.PPK-22/ PL.430/VI/2022 dengan nilai sebesar Rp. 109.237.000,- (seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), seluruh penyediaan sarana prasarana ini sumber dana dari DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong nomor : DIPA -032.03.2.427692/2022, tanggal 17 November 2021.

#### **S.06 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya Saing IKS 06. 1. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)



merupakan Capaian tingkat operasional PPN Brondong yang berupa penyediaan data operasional pelabuhan, pelayanan kesyahbandaran, pelayanan usaha pelabuhan perikanan, pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan pemenuhan dokumen operasional pelabuhan yang digabung serta dihitung menjadi Nilai Evkin (Evaluasi Kinerja) dan dapat diakses melalui website PIPP. Sasaran dari indikator ini adalah Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan dihitung berdasarkan Nilai tingkat operasional PPN Brondong diperoleh dari aplikasi PIPP. Tingkat Operasional di UPT PPN Brondong yang memenuhi standar adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan-kegiatan operasional UPT PPN Brondong. Kegiatan tersebut meliputi : Laporan PIPP.

Capaian indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2022 sebesar 92,16 atau sebesar 112,39% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 82.

Tabel 11.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong  
Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	82	92,16	112,39

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PIPP hingga tahun 2022 adalah sebesar 92,16 dengan capaian 112,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82. Capaian indikator ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di 2021, yaitu sebesar 85,71 dengan capaian 105,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar 81. Hal ini dicapai dengan koordinasi yang baik antar pegawai di PPN Brondong demi mendukung pencapaian target IKU tingkat operasional untuk mengatasi kendala yang ada pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu dengan menugaskan 8 orang pegawai untuk mencari dan mengentry data dukung operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP serta di lakukan supervise dan evaluasi oleh atasan langsung terkait. Mereka terdiri dari 4 orang pegawai di subkoordinator kelompok Operasional Pelabuhan, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Kesyahbandaran, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha serta 2 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Usaha. Indikator ini didukung anggaran sebesar Rp.

49.096.000,-. Mereka melakukan entry data sesuai dengan bagiannya masing-masing. Petugas di subkoordinator kelompok Operasional Pelabuhan mengentry data kapal dan alat tangkap, data produksi, data SL3 dan data Revit Tuna. Petugas di subkoordinator kelompok Kesyahbandaran mengentry data BBM dan data SHTI, petugas di subkoordinator kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mengentry data PNBPN, data lahan dan investasi pelabuhan, data existing dan perkiraan biaya pembangunan, dan data nilai ekonomi. Adapun petugas di subkoordinator kelompok Tata Usaha mengentry data umum pelabuhan perikanan dan data instansi serta lembaga di pelabuhan. Kegiatan entry data dilakukan setiap hari. Data yang dikumpulkan oleh enumerator hari ini akan direkap dan diolah. Data tersebut kemudian di masukan dalam aplikasi PIPP keesokan harinya.

Pencapaian IK “Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu :

1. Adanya monitoring dan evaluasi setiap awal bulannya terkait capaian kinerja pelabuhan yang terdapat dalam aplikasi PIPP.
2. Jumlah petugas operator yang mencukupi yaitu sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai di subkoordinator kelompok Operasional Pelabuhan, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Kesyahbandaran, 1 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha serta 2 orang pegawai di subkoordinator kelompok Tata Usaha.
3. Jaringan internet yang memadai untuk menjalankan aplikasi PIPP.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tahun 2022, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP.
2. Meningkatkan koneksi jaringan internet.

## **S.07 Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

### **IKS 07. 1. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya**

Permasalahan permodalan atau pembiayaan masih belum menjadi salah satu aspek yang strategis di daerah sehingga masih kurang mendapatkan perhatian dan alokasi dana pendampingan dari Pemerintah, padahal dalam suatu usaha terutama adalah usaha penangkapan ikan keterbatasan sarana dan prasarana produksi penangkapan akan menyebabkan pertumbuhan sektor Kelautan dan Perikanan masih belum optimal.



Besarnya potensi usaha penangkapan ikan tidak didukung oleh sarana prasarana yang ada sehingga sebagian besar pelaku usaha di bidang ini berskala mikro dan kecil (sekitar 85%). Untuk itu dalam pengembangan usaha diperlukan modal usaha yang memadai sehingga akan dapat meningkatkan pengembangan usaha dengan kata lain bahwa nelayan dan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan mengalami keterbatasan akses permodalan.

Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan adalah salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud upaya penyediaan sumberdaya keuangan bagi nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan di sektor Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui Lembaga Bank dan Non Bank.

Dengan adanya Pojok Pendanaan Nelayan di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong* maka akan merupakan jembatan penghubung antara pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan dengan Lembaga Keuangan sehingga para pelaku usaha dapat menambah permodalan usaha penangkapan ikan.

Indikator tingkat jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong* merupakan kegiatan untuk penyediaan pojok pendanaan untuk pengguna jasa yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan di pojok pendanaan tersebut. Hasil capaian dari Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nelayan yang terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong*. Harapannya dengan adanya kegiatan ini Pendapatan Nelayan di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong* dapat meningkat.

Tabel 12.

Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	24	40	116,67

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nelayan yang telah difasilitasi untuk penambahan modal usaha penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong* pada tahun 2022 adalah sebanyak 40 orang atau lebih besar dari target sebesar 24 orang sehingga persentase capain kinerja sebesar 116,67%. Dibandingkan dengan realisasi periode tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 105%, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usaha di Pelabuhan Perikanan *Nusantara Brondong*” dengan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 11,67%.

Pencapaian IK “Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Sudah disiapkan tempat/ruangan untuk Pojok Pendanaan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
2. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan pengguna jasa dengan cara memberikan informasi tentang pinjaman penambahan modal usaha untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan dengan sistem KUR.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Mengintensifkan sosialisasi kepada nelayan dan pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tentang pinjaman modal usaha penangkapan ikan dengan sistem KUR.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan yang ada disekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tentang pinjaman modal usaha dengan sistem KUR.

**S.08 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

**IKS 08. 1. Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional**

Indikator Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional merupakan indikator operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712. Sasaran dari tata Kelola sumberdaya perikanan tangkap bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dihitung berdasarkan Laporan kegiatan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di WPP 712.

Tabel 13.  
Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional	1	1	100



Berdasarkan Tabel diatas, indikator pelaksanaan lembaga pengelola perikanan 712 yang operasional sebanyak 1 lembaga atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 1 lembaga. Indikator ini tercapai dengan terlaksanakannya kegiatan operasionalisasi lembaga pengelolaan perikanan WPPNRI dalam mendukung penangkapan ikan terukur. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 72.340.000,- dengan melibatkan peserta sebanyak 30 orang.

Pencapaian IK “Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang Operasional” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu adanya koordinasi yang baik antara pihak pengelola dengan anggota WPPNRI 712 dan panel ilmiah.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi produksi perikanan tangkap di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antara pihak pengelola dengan anggota WPPNRI 712 dan panel ilmiah.
2. Dibentuknya WA Group Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang Operasional

**IKS 08. 2. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi**

Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan yang dibangun berbasis Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SILOPI yang berupa sistem informasi yang memuat proses pengisian data (data entry), verifikasi, validasi data, analisis data, dan penyajian informasi Log Book Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan. Pelaksanaan verifikasi dan validasi LBPI dilakukam oleh Petugas LBPI PPN Brondong dilakukan menggunakan aplikasi SILOPI maupun e LBPI, pada Tahun 2022 telah melaksanakan verifikasi dan validasi LBPI sebanyak 182 dokumen sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 14.

Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	160	182	113,75

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi sebanyak 182 dokumen dari target sebanyak 160 dokumen atau presentase realisasi kinerja mencapai 113,75%. Realisasi IK “Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi” pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki capaian atau realisasi dari target 187,50%. Pencapaian IK “Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi” tahun 2022 didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pelaksanaan Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi dilaksanakan dalam bentuk desiminasi dan mengundang nakhoda dan perwakilan pengusaha perikanan tangkap, sedangkan proses verifikasi dan validasi dilakukan pada saat kedatangan kapal atau laporan LBPI terkirim kedalam aplikasi;
2. Sinergitas Pemerintah daerah dalam kegiatan sosialisasi dan asistensi penyampaian Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi di sentra nelayan atau Pelabuhan Perikanan UPTD yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pengumpulan dan verifikasi Laporan Data logbook penangkapan Ikan di PPN Brondong pada tahun 2023, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi petugas kesyahbandaran atau LBPI terutama pelayanan dengan menggunakan aplikasi e LBPI;
2. Pengadaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi Laporan Data logbook penangkapan Ikan di PPN Brondong.

#### **S.09 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

##### **IKS 09. 1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan**

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA Nomor 19/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2022 selanjutnya dirubah dengan SK KPA Nomor 168/PPNBR.KPA-22/KU.110/IV/2022. Pengukuran capaian kinerja IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” dengan melakukan penilaian mandiri oleh Tim dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Realiasi PM ZI di PPN Brondong pada tahun 2022 yaitu 89,19.

Tabel 15.

Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	75,07	89,19	118,81

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai PM pembangunan ZI di PPN Brondong pada tahun 2022 adalah sebanyak lebih besar dari target sebesar 14,12 sehingga persentase capain kinerja sebesar 118,81%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” mengalami kenaikan sebesar 19,44 dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 27,87% dan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 2,35 dan capaian kinerja 2,70%. Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, target nilai PM pembanguna ZI pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan sebesar 75,07 sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampui dari target.

Pencapaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Melakukan sinergisitas melalui kerjasama internal yang produktif dan

harmonis.

2. Menanamkan nilai-nilai *core value* Bermoral (Berinovasi, Melayani, Optimis, Anti rasuah, dan akuntabel) setiap apel pagi.
3. Peran pimpinan sebagai agen perubahan.
4. Peningkatan kompetensi dan wawasan pegawai PPN Brondong tentang pelayanan publik dan komitmen.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan pembangunan ZI di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Pembentukan Tim dengan melibatkan semua unsur pegawai.
2. Penunjukan agen perubahan.
3. Peningkatan sarana dan prasana serta komitmen pegawai. PPN Brondong dalam implementasi nilai-nilai ZI.

#### **IKS 09. 2. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK**

Dokumen LHP merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewajiban pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pengukuran IK “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK” dengan membandingkan aksi yang telah dilakukan terhadap rekomendasi. Pada tahun 2022, PPN Brondong telah melakukan aksi tindak lanjut terhadap LHP BPK dengan capaian 100%.

Tabel 16.  
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase penyelesaian temuan LHP BPK tahun 2022 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capain ini berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap 2 (dua) LHP BPK berupa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah belum memadai dan pengelolaan dan penatausahaan



aset lainnya belum sepenuhnya tertib. Pada tahun 2020 dan 2021, penyelesaian temuan LHP BPK tidak menjadi IK sehingga tidak dilakukan perbandingan.

Pencapaian IK “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Pendampingan dari Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal KKP, dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dalam penyelesaian temuan LHP BPK.
2. Melakukan koordinasi secara intens dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti terhadap temuan LHP BPK.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi penyelesaian temuan LHP BPK di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut temuan BPK.
2. Membentuk tim khusus dalam rangka percepatan penyelesaian temuan LH BPK.

### **IKS 09. 3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2022 didasarkan oleh SK KPA Nomor 17/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2022 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Kinerja, Tim Penyusun LKJ dan Tim PM SAKIP Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2022 dan diubah dengan SK KPA Nomor 169/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2022. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, pada tahun 2022 nilai SAKIP PPN Brondong adalah 80,40 sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 17.  
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	80,01	80,40	100,49

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai PM SAKIP PPN Brondong pada tahun 2022 telah melebihi dari terget dengan persentase capaian sebesar 100,49%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami penurunan dimana nilai PM SAKIP tahun 2020 sebesar 87,40 dan tahun 2021 sebesar 87,78 hal ini dikaenakan terdapatnya perbedaan dalam melakukan pengukuran.

Pencapaian IK Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Komitmen yang kuat dari Kepala Pelabuhan selalu pimpinan unit kerja.
2. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan akuntabilitas di PPN Brondong.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian PM SAKIP di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas pengelola akuntabilitas dilingkup PPN Brondong.
2. Melakukan internalisasi kinerja akuntabilitas secara berkala kepada seluruh pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian kinerja organisasi.

#### **IKS 09. 4. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP ASN mempunyai bertujuan sebagai dasar perumusan organisasi untuk melakukan pengembangan ASN berdasarkan capaian kerjanya. Sebagai bahan pengembangan diri secara individu dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. IP ASN juga bertujuan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu



bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Metode pengukuran IP ASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Terdapat 5 (lima) prinsip dalam pengukuran IP ASN yaitu koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional. Dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penilaian IP ASN yaitu (1) disiplin dengan indikator hukuman disiplin, (2) kualifikasi dengan indikator pendidikan formal, (3) kompetensi dengan indikator diklatpim (struktural) , diklat fungsional (JFT), diklat teknis, dan workshop/seminar, (4) kinerja dengan indikator nilai SKP. Capaian kinerja IK “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, nilai IP ASN di PPN Brondong sebesar 81,91.

Tabel 18.  
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	79	81,91	103,68

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IP ASN PPN Brondong pada tahun 2022 adalah 81,91 atau lebih besar dari target sebesar 79 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 103,68%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari capaian 2021 sebesar 81,84. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 20,83%, dimana nilai IP ASN PPN Brondong tahun 2020 sebesar 67,79. Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, target IP ASN pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan sebesar 75 dengan sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampaui dari target.

Pencapaian IK “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Terlaksananya diklat teknis dan seminar bagi seluruh pegawai.
  2. Nilai kinerja pegawai yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai IP ASN
- Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi nilai IP ASN di PPN

Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi tentang tugas dan ijin belajar kepada pegawai dalam rangka peningkatan kualifikasi.
2. Pengusulan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, kurusu dan seminar.
3. Sosialisasi kode etik ASN.

#### **IKS 09. 5. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan**

##### **Perikanan Nusantara Brondong**

Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria yaitu (1) memiliki dampak langsung kepada masyarakat, (2) memiliki anggaran besar, (3) mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP, (4) mendukung pencapaian prioritas nasional, (5) merupakan arahan direktif presiden, dan (6) pertimbangan lainnya yang relevan. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, kegiatan prioritas/strategis di PPN Brondong tercapain sebesar 100%, hal ini berdasarkan relaiasi pelaksanaan fisik pendukung program penerapan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi.

Tabel 19.  
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan  
Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75	100	133,33

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis pada tahun 2022 adalah 100% atau lebih besar dari target sebesar 75% sehingga persentase capain kinerja sebesar 133,33%. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak menjadi indikator kinerja.

Pencapaian IK “Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:



1. Monitoring secara berkala oleh pimpinan dan Eselon I tentang realisasi kegiatan prioritas /strategis.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar sektor sehingga dapat dilakukan percepatan realisasi.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan perencanaan secara matang terhadap kegiatan prioritas/strategis.
2. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan stakeholder dalam relasi kegiatan prioritas/strategis.
3. Penguatan tim dalam pencapaian kegiatan prioritas/strategis.

#### **IKS 09. 6. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pengukuran berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator (1) ketersediaan manajemen risiko PBJ strategis, (2) perencanaan dan persiapan pengadaan, (3) presentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan (5) laporan penyelenggaraan PBJ, dan (6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong sebesar 498,68.

Tabel 20.  
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS			Target	Realisasi	%
Tingkat Barang/Jasa Nusantara Brondong	Kepatuhan Pelabuhan	Pengadaan Perikanan	75	98,68	131,57

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong pada tahun 2022 adalah sebanyak 98,68 atau lebih besar dari target sebesar 75 sehingga persentase capain kinerja sebesar 131,57%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami kenaikan sebesar 24,04% dari capaian tahun 2021 sebesar 79,55. Pada tahun 2020 kepatuhan pengadaan barang/jasa tidak menjadi indikator kinerja.

Pencapaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Melakukan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa dengan melibatkan subkoor teknis.
2. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE.
3. Peningkatan SDM pengelola pengadaan barang/jasa.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa secara akntabel.
2. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022.
3. Penambahan pegawai yang berkompeten melauai diklat PBJ.

#### **IKS 09. 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian



tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong sebesar 85.

Tabel 21.  
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	75	85	113,33

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong pada tahun 2022 adalah sebanyak 85 atau lebih besar dari target sebesar 75 sehingga persentase capain kinerja sebesar 113,334%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami penurunan sebesar 5,55% dari capaian tahun 2021 sebesar 90. Pada tahun 2020 kepatuhan pengelolaan BMN tidak menjadi indikator kinerja.

Pencapaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung terdapatnya monitoring dan evaluasi secara berkala dari eselon I dan APIP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan evaluasi secara berkala di internal PPN Brondong.
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola BMN.

#### **IKS 09. 8. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, nilai IKPA di PPN Brondong sebesar 95,85.

Tabel 22.

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	89	95,85	107,70

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun 2022 adalah sebanyak 95,85 atau lebih besar dari target sebesar 89 sehingga persentase capain kinerja sebesar 107,70%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami penurunan sebesar 0,88% dengan realiasi nilai IKPA tahun 2021 96,71. dan capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,9%. Dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 maka terjadi penurunan realisasi sebesar 9,80% dengan capaian IKPA tahun 2020 sebesar 99,38 dan capaian kinerja 3,35%. Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, target nilai IKPA pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan



sebesar 89 sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampaui dari target.

Pencapaian IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung langkah operasional meningkatnya perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan kinerja. Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi nilai IKPA di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Melakukan sinergi antara perencanaan dengan pelaksanaan realisasi anggaran secara proporsional.
2. Meningkatkan koordinasi pengelola keuangan dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 8 (delapan) indikator kinerja IKPA.

#### **IKS 09. 9. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada tahun 2022, nilai kinerja anggaran di PPN Brondong sebesar 89,64 dengan

kategori Baik.

Tabel 23.  
Nilai Kinerja Anggaran  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

IKS	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	81	89,64	110,67

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai kinerja anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 89,64 atau lebih besar dari target sebesar 81 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 110,67%. Dibandingkan dengan realisasi periode 2021, maka pada tahun 2022 realisasi IK “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” mengalami kenaikan sebesar 7,07 dan capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 13,33% Pada tahun 2020 kepatuhan pengelolaan BMN tidak menjadi indikator kinerja. Dalam Renstra PPN Brondong 2020-2024, nilai kinerja anggaran pada PPN Brondong akhir RPJM ditetapkan sebesar 89 sehingga realisasi pada tahun 2022 telah melampaui dari target.

Pencapaian IK “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2022 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu:

1. Koordinasi antar anggota pengelola keuangan yang solid.
2. Pelaporan oleh petugas yang tepat waktu.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan realisasi kinerja anggaran di PPN Brondong pada tahun 2023, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Penguatan tim pengelola keuangan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan .
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

### 3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di PPN Brondong membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pada tahun 2022 tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di PPN



Brondong adalah sebesar 114,10 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 24.  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

Uraian	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	113,14	99,16	114,10

### 3.3 Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.847.901.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 13.731.967.724 atau (99,16%). Realisasi anggaran PPN Brondong pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25.  
Realiasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
Belanja Pegawai (51)	6.606.823.000	6.576.045.799	99,53
Belanja Barang (52)	6.235.360.000	6.151.189.925	98,65
Belanja Modal (53)	1.005.718.000	1.004.732.000	99,90

Tabel 26.  
Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan  
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2337   Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	228.600.000	210.304.230	92,00
2338   Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.034.508.000	2.016.968.479	99,14
2339   Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	4.000.000	100
2341   Pengelolaan Sumber Daya Ikan	102.390.000	84.469.367	82,50
2342   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.478.403.000	11.416.225.648	99,46
Total	13.847.901.000	13.731.967.724	99,16

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada PPN Bronodng Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PPN Bronodng dalam mencapai sasaran program dan mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Capaian nilai kinerja PPN Brondong pada tahun 2022 sebesar 113,14 yang berasal dari nilai kinerja 19 indikator kinerja. Sebanyak xx indikator kinerja mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021 sedangkan sebanyak xx indikator kinerja mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian realiasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,16% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 13.847.901.000,- atau lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 99,14%.

Dalam pencapaian kinerja tahun 2022 terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Belum optimalnya kegiatan perikanan di PPN Brondong dalam perijinan sehingga operasional pelabuhan terhambat.
2. Jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu masih terbatas sehingga tidak optimalnya dalam pelayanan publik.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan di PPN Brondong.

Dalam peningkatan pencapaian kinerja tahun 2023, maka perlu dilakukan upaya antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan para pihak dalam percepatan kegiatan perijinan usaha di PPN Brondong sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kompetensi melalui diklat, Bimtek dan kursus terhadap SDM PPN Brondong.
3. Melakukan identifikasi dan perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.





Lampiran 1.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022





# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ibrahim**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2022

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong

  
**Muhammad Zaini**

  
**Ibrahim**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN (KRO/RO)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)	1,2
2	Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang akurat	2	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	4.000
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	65
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang)	30
		5	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	30
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBPN perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBPN perikanan tangkap (Unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	82
7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	24
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional (Lembaga)	1
		10	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	160
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	11	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,07
		12	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	100
		13	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	85,25
		14	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	79
		15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75
		18	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	86

**Program** : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan : Rp. 2.067.590.000,-  
2. Dukungan Manajemen : Rp. 11.722.041.000,-  
**Jumlah Anggaran Tahun 2021** : Rp. 13.789.631.000,-

Jakarta, 18 Januari 2022

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Muhammad Zaini

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong

  
Ibrahim





Lampiran 2.  
Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2022



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN**  
**TANGKAPPELABUHAN PERIKANAN**  
**NUSANTARA BRONDONG**

---

**MEMORANDUM**

Nomor.

4/PPNBR/RC.610/II/2023

Kepada : Kepala Subbagian Umum, Subkoordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Subkoordinator Kesyahbandaran, Subkoordinator Operasional

Dari : Kepala Pelabuhan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong T.A. 2022

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 13 Januari 2023

---

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2022, berikut lampiran yang kami laporkan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)
  - Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah pendapatan yang didapatkan dari PNBP di wilayah PPN Brondong. Target dan capaian sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Milyar)	1,2	2,57	214,16

2. Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)
  - Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan rata-rata volume produksi perikanan tangkap pada periode triwulan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Target dan capaian sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	4.000	4.685,42	117,14

3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
  - Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk kapal melaut di



wilayah PPN Brondong. Target dan capaian sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	65	478	733,84

4. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya (Orang)

- Peningkatan kapasitas kompetensi nelayan/awak kapal perikanan guna dapat mengatasi permasalahan yang timbul saat melaut.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	30	96	320

5. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)

- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah awak kapal perikanan yang memiliki perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha untuk kejelasan dalam pembagian hasil melaut.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha (Orang)	30	30	100

6. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)

- Merupakan jumlah unit yang dimiliki oleh Pelabuhan perikanan guna menunjang berjalan lancarnya penerimaan PNBP perikanan tangkap.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menunjang PNBP perikanan tangkap (Unit)	1	1	100

7. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

- Merupakan hasil akhir persentase tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	82	85,83	104,67

8. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)

- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	24	40	166,67

9. Lembaga Pengelola Perikanan 712 yang operasional (Lembaga)

- Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017, adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan dalam mengoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Lembaga Pengelolaan Perikanan 712 yang operasional (Lemabaga)	1	1	100

10. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)

- Merupakan laporan dari hasil pencatatan data logbook yang diambil dari laporan hasil tangkapan nelayan kemudian dilakukan verifikasi data logbook oleh petugas syahbandar dalam bentuk laporan.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Laporan Data Logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	160	182	112,5



11. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) (Nilai)  
Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan hasil penilaian pembangunan ZI di wilayah PPN Brondong. Target dan capaian sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,07	89,19	109,23

12. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)

- Penyelesaian atas temuan BPK yang dilakukan berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2021.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	100	100	100

13. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan hasil penilaian mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan metode pengukuran tahunan.
- Kegiatan yang mendukung pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut:

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	80,01	80,40	100,49

14. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

- IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). IKU ini memiliki periode penilaian semesteran.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (indeks)	79	81,91	103,68

Tabel diatas menunjukkan capaian IP ASN Tahun 2022, dimana IKU IP ASN diukur secara semesteran.

15. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	75	100	133,33

- Indikator yang menunjukkan tingkat efektifitas atas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2021.

16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)

- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan Tingkat Kepatuhan PengadaanBarang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang sesuai ketentuan yang berlaku.

IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	CAPAIAN (%)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	75	98,68	131,59

17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)

- Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Satker PPN Brondong yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	CAPAIAN (%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (persen)	75	85	120

18. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

- IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D,



Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	89	95,85	107,7

19. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. IKU ini memiliki periode pengukuran tahunan.
- Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I /program atau satuan kerja/ kegiatan.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (nilai)	86	89,64	104,23

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung sampaidengan Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohonarahan lebih lanjut.

Lamongan, 13 Januari 2023

Kepala Pelabuhan



Ibrahim, A.Pi, M.Si

Untuk Perhatian :  
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN